

ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH PADA PEMERINTAH KOTA TEGAL PERIODE TAHUN 2016-2020

Andri Widiyanto¹, Ghea Dwi Rahmadiane², Tri Ana³
^{1,2}Program Studi D-III Akuntansi Politeknik Harapan Bersama,
email: trianaxiitav1@gmail.com

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pendapatan asli daerah (PAD) dan kemampuan keuangan pemerintah daerah di Kota Tegal tahun 2016-2020. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan studi pustaka. Dalam penulisan ini jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif seperti data APBD Kota Tegal tahun 2016-2020. Analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan tren untuk pendapatan asli daerah di Kota Tegal cenderung mengalami kenaikan. Walaupun pada tahun 2019 mengalami penurunan. Sedangkan untuk kemampuan keuangan daerah Kota Tegal mengalami penurunan pada tahun 2017-2020 sedangkan 2016 mendapatkan kategori tinggi.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Kemampuan Keuangan Daerah

THE ANALYSIS OF REGIONAL ORIGINAL INCOME AND REGIONAL FINANCIAL CAPABILITY IN THE TEGAL CITY GOVERNMENT FOR THE 2016-2020 PERIOD

Abstract

The purpose of this study was to determine and analyze the Regional Original Income (PAD) and the Financial Capability of the Regional Government in the City of Tegal in 2016-2020. The used data collection were observation, interviews, and literature study. In this research, the type of data was quantitative data such as data from the 2016-2020 City Budget of Tegal. Data analysis in this study was descriptive qualitative. The results showed that the trend for local revenue in Tegal City tends to increase. Although in 2019 it decreased. Meanwhile, the financial capacity of the Tegal City area decreased in 2017-2020 while 2016 received a high category.

Keywords: Regional Original Income (PAD), Regional Financial Capability

PENDAHULUAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana kegiatan pemerintah daerah yang dituangkan dalam bentuk angka dan batas maksimal untuk periode anggaran (Halim, 2002). APBD juga diartikan sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh dewan perwakilan rakyat daerah.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 31 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, maka daerah diberikan otonomi atas kewenangan kepada daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Adanya desentralisasi keuangan merupakan konsekuensi dari adanya kewenangan untuk mengelola keuangan secara mandiri. Pendapatan asli daerah adalah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, optimalisasi penerimaan pendapatan asli

daerah hendaknya didukung upaya pemerintah daerah dengan meningkatkan kualitas layanan publik (Mardiasmo, 2002).

Otonomi daerah harus disadari sebagai suatu transformasi paradigma dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan di daerah, dimana pemerintah daerah memiliki otonomi yang lebih luas untuk mengelola sumber-sumber ekonomi daerah secara mandiri dan bertanggung jawab yang hasilnya diorientasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerahnya.

Transformasi paradigm dalam hal ini terletak pada aspek akuntabilitas pemerintah daerah dalam rangka mengelola sumber-sumber ekonomi yang semula bersifat akuntabilitas vertikal (kepada pemerintah) menjadi akuntabilitas horizontal kepada masyarakat yang di daerah (Mardiasmo, 2002).

Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Dengan adanya otonomi daerah ini, berarti pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri tak terkecuali yang mandiri dalam masalah *financial*. Meskipun demikian, pemerintah pusat tetap memberikan dana bantuan merupakan dana alokasi umum yang akan ditransfer ke pemerintah daerah, dan dalam prakteknya dana alokasi umum dari pemerintah pusat merupakan sumber pendanaan utama pemerintah daerah yang dipakai membiayai operasional daerah, yang oleh pemerintah daerah akan dilaporkan diperhitungkan anggaran.

Tujuan dari anggaran dana alokasi umum dari pemerintah pusat ini untuk mengurangi beban dari pemerintah daerah. Dalam undang-undang No. 32 tahun 2004 disebutkan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat akan mentransfer dana perimbangan yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam. Pemerintah daerah juga mempunyai

sumber pendanaan sendiri yaitu pendapatan asli daerah dan juga pembiayaan lain-lain pendapatan daerah. Kebijakan penggunaan semua dana tersebut akan diserahkan kepada pemerintah daerah dan dana transfer dari pemerintah pusat akan digunakan secara efektif dan efisien oleh pemerintah daerah untuk keperluan meningkatkan pembangunan di daerah tersebut.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana perkembangan pendapatan asli daerah dan kemampuan keuangan daerah pada pemerintah Kota Tegal periode tahun 2016-2020.

Kegunaan penelitian ini yaitu untuk memberikan informasi dan menambah pengetahuan mengenai pendapatan asli daerah dan kemampuan keuangan daerah Kota Tegal dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Serta memberikan masukan kepada pemerintah daerah Kota Tegal dalam hal menyusun kebijakan dan langkah-langkah yang akan dipergunakan untuk menaikkan kembali pendapatan asli daerah serta kemampuan keuangan daerah setelah terjadinya pandemi Covid-19.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilaksanakan selama 5 bulan terhitung dari bulan Maret sampai dengan bulan Juli 2021. Penelitian ini dilakukan di kantor badan perencanaan dan pendapatan daerah tahun 2016-2020 di Balaikota Tegal.

Populasi

Populasi dalam penelitian ini yaitu Kota Tegal badan perencanaan dan pendapatan asli daerah tahun 2016-2020.

Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif. Data kuantitatif menurut

(Suliyanto 2005) yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk angka dan merupakan hasil dari perhitungan dan pengukuran.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Data sekunder menurut Suliyanto (2005) adalah data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahnya.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Studi Pustaka

Studi Pustaka menurut Sugiyono (2016) merupakan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari literature-literatur ilmiah. Dokumen yang dikumpulkan berupa referensi-referensi untuk menambah pengetahuan mengenai masalah yang akan dibahas di Tugas Akhir ini.

2. Dokumentasi

Dokumen menurut Sugiyono (2016) merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan dan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni yang dapat berupa gambar, patung, film dan sebagainya.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan Analisis Data Kualitatif. Menurut Sugiono (2018:335) "Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan

suatu nilai dibalik data yang tampak. Adapun Langkah-langkah Analisis Kualitatif adalah sebagai berikut: Reduksi Data, Penyajian Data, Kesimpulan dan Verifikasi.

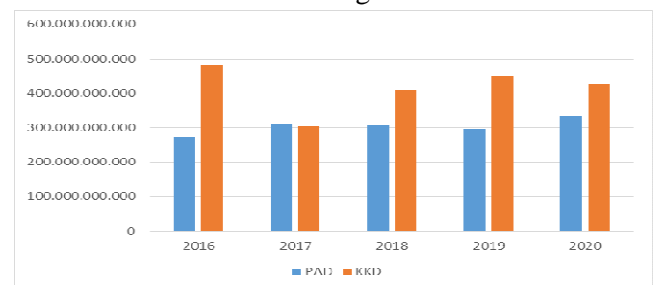
HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan pendapatan asli daerah dan kemampuan keuangan daerah Kota Tegal periode tahun 2016-2020.

Tabel 1. Data PAD dan KKD Tahun 2016-2020 Kota Tegal

Tahun	PAD	KKD
2016	273.470.357.000	482.772.533.000
2017	310.927.508.000	303.603.715.000
2018	305.484.446.000	409.979.263.542
2019	297.677.322.000	451.406.492.492
2020	333.012.742.000	428.334.201.656

Gambar 1. Grafik PAD dan KKD Tahun 2016-2020 Kota Tegal



Sumber : Data diolah, 2021

Berdasarkan tabel 1 dan gambar 1 di atas diketahui APBD Kota Tegal tahun 2016. Berdasarkan perda No.5 tahun 2016 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Tegal tahun anggaran 2016 dan disahkan walikota Tegal Siti Masitho Soeparno. Dimana dalam PERDA tersebut berisi perubahan-perubahan pada beberapa anggaran-anggaran daerah Kota Tegal, diantaranya: anggaran pendapatan tahun anggaran 2016 berjumlah Rp 1.081.649.763.000, anggaran belanja daerah berjumlah Rp 1.218.200.045.000.

Berdasarkan revisi yang terdapat pada PERDA Kota Tegal No.5 tahun 2015 ke PERDA Kota Tegal No.5 tahun 2016, dimana

pada PERDA tersebut mengalami penambahan anggaran tahunan Kota Tegal, yang hal tersebut akan digunakan sebagai dana pembangunan Kota Tegal tahun anggaran 2016 dan telah mendapatkan persetujuan DPRD Kota Tegal dan menetapkannya menjadi PERDA Kota Tegal. Atas disetujui APBD Kota Tegal tersebut dapat menutup defisit anggaran tahun 2016 sehingga permasalahan anggaran tahun 2016 dapat terselesaikan dengan baik.

APBD Kota Tegal tahun 2017. Terdapat pada peraturan walikota Tegal yaitu perwal nomor 22 tahun 2018 tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Tegal tahun anggaran 2017. Dengan rincian pendapatan asli daerah Rp 310.927.508.000 dan pendapatan total daerah Kota Tegal tahun anggaran 2017 yang diperoleh dari pendapatan asli daerah dan dana transfer baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dengan jumlah total pendapatan Rp 1.067.221.788.000 dan belanja daerah Kota Tegal tahun anggaran tahun 2017 sebesar Rp 1.192.371.938.000 sehingga pada tahun anggaran 2017 Kota Tegal mengalami defisit sebesar Rp 125.150.150.000.

Perwal nomor 22 tahun 2018 yang ditetapkan oleh walikota Tegal Mohamad Nursholeh, merupakan hasil setelah adanya penambahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Tegal tahun anggaran 2017 yaitu terdapat pada Perwal No.26 tahun 2017. Pada pendapatan daerah mendapatkan penambahan anggaran sebesar Rp 38.498.760.000 dari semula hanya sebesar Rp 1.028.723.028.000 menjadi Rp 1.067.221.788.000. dan juga pada belanja daerah Kota Tegal untuk anggaran tahun 2017 dari semula sebesar Rp 1.150.919.453.000 mendapatkan penambahan sebesar Rp 41.452.485.000 sehingga menjadi Rp 1.192.371.938.000. pada tahun 2017

pendapatan asli daerah mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp 14.427.975.000 tetapi pada belanja daerah mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

APBD Kota Tegal tahun anggaran 2018. Pada Perwal nomor 12 tahun 2018 tentang perubahan atas Perwal nomor 43 tahun 2017. Tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Tegal tahun anggaran 2018. Dan juga pada PERDA nomor 7 tahun 2017 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Tegal tahun anggaran 2018. Dimana didapat pendapatan asli daerah Kota Tegal tahun 2018 sebesar Rp 305.484.446.000 untuk belanja daerah Kota Tegal tahun anggaran 2018 sebesar Rp 1.140.134.132.000 sehingga mengalami defisit sebesar Rp 95.606.428.000. Pada tahun anggaran 2018 diperoleh mulai pendapatan daerah Kota Tegal yang lebih kecil dari tahun 2017. Begitu juga dengan belanja daerah Kota Tegal yang mengalami penurunan tersebut disebabkan adanya penurunan pada dana transfer dari pemerintah pusat dan dana transfer dari pemerintah provinsi dan juga dari pendapatan asli daerah Kota Tegal itu sendiri.

APBD Kota Tegal tahun anggaran tahun 2019. Pada peraturan daerah PERDA Nomor 6 tahun 2020 tentang peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Tegal tahun anggaran 2018 diperoleh pendapatan daerah sebesar Rp 1.043.670.057.000 dengan pendapatan asli daerah (PAD) Rp 297.677.322.000 dan dengan belanja daerah Kota Tegal tahun anggaran 2019 sebesar Rp 1.120.465.803.000 dengan dana transfer sebesar Rp 664.378.158.000 dimana mengalami defisit sebesar Rp 76.795.746.000. Adanya penurunan untuk pendapatan daerah Kota Tegal untuk tahun anggaran 2019 menurut Walikota Tegal Dedi Yon Supriyono yang disampaikan pada penyerahan laporan pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD Kota Tegal tahun 2019 dalam rapat paripurna di ruang rapat DPRD Kota Tegal. Disebabkan karena adanya penurunan pendapatan asli daerah Kota Tegal karena terdapat penurunan juga pada dana transfer dari pemerintah pusat untuk tahun anggaran 2019.

APBD Kota Tegal tahun anggaran 2020. Pada peraturan daerah Kota Tegal PERDA Nomor 8 tahun 2019 tentang APBD Kota Tegal untuk tahun anggaran 2020 dimana didapat pendapatan daerah Kota Tegal sebesar Rp 1.132.970.758.000 dengan pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 333.012.742.000 dengan nilai belanja daerah Kota Tegal tahun anggaran 2020 sebesar Rp 1.278.393.100.000 dengan nilai defisit sebesar Rp 145.422.342.000 dan terdapat perubahan anggaran APBD Kota Tegal untuk tahun anggaran 2020 sebesar Rp 1.053.078.078.000.

Adanya perubahan nilai APBD tersebut akan mempengaruhi nilai dana transfer dari pusat dan akan dilaporkan pada Gubernur Jawa Tengah guna memperoleh kesepakatan dan kebijakan antara pemerintah Kota Tegal dengan pemerintah pusat. Pada pendapatan Kota Tegal untuk tahun anggaran 2020 mengalami kenaikan dibanding tahun anggaran 2019 dikarenakan adanya kenaikan pada pendapatan asli daerah (PAD) Kota Tegal dimana terdapat kenaikan pada dana transfer baik dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah provinsi, karena adanya perubahan anggaran yang telah diajukan sebelumnya oleh pemerintah Kota Tegal kepada pemerintah pusat dan mendapatkan penambahan baik pada pendapatan daerah Kota Tegal dan pada belanja daerah Kota Tegal tahun anggaran 2020.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan uraian diatas bahwa kesimpulan dalam penelitian ini adalah pendapatan asli daerah di Kota Tegal cenderung mengalami kenaikan. Walaupun pada tahun 2019 mengalami penurunan. Sedangkan untuk kemampuan keuangan daerah Kota Tegal mengalami penurunan pada tahun 2017-2020 sedangkan 2016 Mendapatkan Kategori Tinggi menurut Dasar perhitungan permendagri 21 tahun 2007 dan permendagri 62 tahun 2017.

Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan dalam penelitian ini, maka saran yang dapat diberikan peneliti bagi pemerintah daerah Kota Tegal diharapkan mampu meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat, upaya ini harus diarahkan dengan mempertahankan dan menggali potensi daerah agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan sehingga dapat menambahkan pendapatan asli daerah (PAD).

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Ibu Yeni Priatna Sari, SE, M.Si, Ak, CA, selaku Ka Prodi DIII Akuntansi Politeknik Harapan Bersama.
2. Bapak Andri Widiyanto, SE, M,Si, selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan, bantuan dan bimbingan hingga terselesaikannya penyusunan Tugas Akhir ini.
3. Ibu Ghea Dwi R, S.E., M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan bantuan dan bimbingan hingga terselesaikannya penyusunan Tugas Akhir ini.
4. Orang tua dan sahabat-sahabat baik di kampus maupun luar kampus, yang telah

memberikan dorongan dan semangat serta semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung turut membantu terselesaikannya Tugas Akhir ini.

DAFTAR PUSTAKA

- D Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Halim, Abdul. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. (2004). *Bunga Rampai Manaj. Keuang. Daerah. Ed. Revisi, Yogyakarta UPP AMP YKPN*.
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang. No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuang. Antara Pemerintah Pus. dan Daerah*, Jakarta Sinar Graf.
- Suliyanto. 2005. *Metode Riset Bisnis*. Yogyakarta: Andi.
- Sugiyono. 2016. *Statistik Untuk Penelitian*. Bandung: CV Alfabeta.